



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PEKERJA ALIH
DAYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : STUDI
JAMINAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN PRINSIP-
PRINSIP PBB ATAS BISNIS DAN HAM**

TESIS

RACHMANI APRILIA SARI

1910622002

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Rachmani Aprilia Sari

NRP : 1910622002

Tanggal :

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2021

Yang Menyatakan



Rachmani Aprilia Sari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rachmani Aprilia Sari
NRP : 1910622002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Ekklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PEKERJA ALIH DAYA
DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA :
STUDI JAMINAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP PBB ATAS BISNIS DAN HAM**

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2021
Yang menyatakan



Rachmani Aprilia Sari

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Rachmani Aprilia Sari

NRP : 1910622002

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

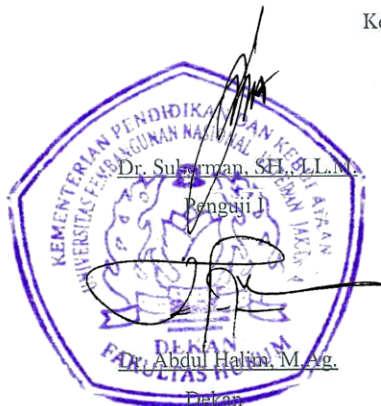
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PEKERJA ALIH DAYA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : STUDI JAMINAN KESEJAHTERAAN BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP PBB ATAS BISNIS DAN HAM**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian pernyataan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Ketua Penguji



Dr. Sulisman, SH., LL.M.

Penguji I

Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Dekan



Dr. Iwan Erar Joesof, SH., MKn

Penguji II/ Pembimbing



Dr. Beniharmom Harefa, SH., LL.M

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 22 Juli 2021

ABSTRAK

Banyak regulasi yang tumpang tindih dan pertumbuhan persentase pengangguran di Indonesia, maka Pemerintah mencoba menyelaraskan dan mengharmonisasikan aturan-aturan tersebut dengan menggunakan sistem hukum Omnibus Law. Omnibus Law sebagai strategi reformasi regulasi, agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan. Secara historis, Omnibus Law sebelumnya sudah diterapkan di negara-negara dengan sistem hukum Common Law. Salah satu tujuan Pemerintah agar menarik investor di Indonesia, sehingga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satu dari 11 klaster UU Cipta Kerja, yang paling banyak menuai pro dan kontra adalah Klaster Ketenagakerjaan. Peneliti tertarik dengan salah satu pasal dalam UU Cipta Kerja terkait pekerja alih daya. Hak Asasi Manusi dan Bisnis saling berkaitan satu sama lainnya, hal tersebut tertuang pada Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban perusahaan kepada pekerja berdasarkan UU Cipta Kerja dan pertanggung jawaban perusahaan dikaitkan Prinsip PBB atas Bisnis dan HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yaitu tanggung jawab perusahaan dalam peraturan turunan UU Cipta Kerja berperan penuh dalam menjamin kesejahteraan pekerja sampai apabila sebuah perselisihan diantara kedua belah pihak. Hubungan antara Bisnis dan HAM saling berkaitan karena negara dan perusahaan memiliki peran masing-masing dalam melindungi, menghormati dan memberikan solusi yang tertuang dalam implementasi prinsip PBB. Indonesia pun sudah meratifikasi 4 poin utama Konvensi ILO ke dalam hukum nasional terkait hak-hak pekerja, seperti Hak Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi, Penghapusan Segala Bentuk Pemaksaan dalam Bekerja, Penghapusan Pekerja Bagi Anak-Anak, Penghapusan Diskriminasi dalam Segi Pekerjaan dan Jabatan/Posisi.

Kata Kunci : UU Cipta Kerja, Prinsip PBB, Tanggung Jawab Perusahaan, Bisnis dan Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Many regulations overlap and the growth of the percentage of unemployment in Indonesia, the Government tries to harmonize and harmonize these rules using the Omnibus Law system. Omnibus Law as a regulatory reform strategy, so that the arrangement is carried out simultaneously against many laws and regulations. Historically, omnibus law has previously been implemented in countries with common law system. One of the government's goals is to attract investors in Indonesia, thus opening up many jobs for the community. One of the 11 clusters of The Copyright Act, the most reaped the pros and cons is the Employment Cluster. Researchers are interested in one of the articles in the Copyright Act related to outsourced workers. Human rights and business are related to each other, it is stated in the Principles of Business Guidelines and Human Rights. The purpose of this research is how the company's liability to workers based on the Copyright Act and corporate liability is attributed to the United Nations Principles on Business and Human Rights. The method used in juridical research is normative. Normative juridical uses secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The result of the research is the responsibility of the company in the derivatives of the Copyright Act plays a full role in ensuring the welfare of workers until if a dispute between the two parties. The relationship between Business and Human Rights is interrelated because countries and companies have their respective roles in protecting, respecting and providing solutions contained in the implementation of UN principles. Indonesia has also ratified the 4 main points of the ILO Convention into national law regarding workers' rights, such as the Right to Freedom of Association and Organization, the Elimination of All Forms of Coercion in Work, the Elimination of Workers for Children, the Elimination of Discrimination in Terms of Employment and Positions.

Keywords : Copyright Act, UN Principles, Corporate Responsibility, Business and Human Rights

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh diberkahi oleh Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pekerja Alih Daya Dalam Undang-Undang Cipta Kerja : Studi Jaminan Kesejahteraan Berdasarkan Prinsip-Prinsip PBB Atas Bisnis dan HAM.

Adapun maksud dan tujuan dari Penulisan tugas akhir ini adalah sebagai syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Banyak hambatan dan kendala yang dialami oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. Selaku Ketua Penguji dan Dekan Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M. Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Iwan Erar Joesof, SH., MKn. Selaku Penguji II dan Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan referensi dalam kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M. Selaku Penguji I yang telah memberikan masukan dalam kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Seluruh Staf-Staf Kesekretariatan Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

7. Ibunda tercinta Ibu Dinem Diniati dan Ayahanda tercinta Bapak Paryadi yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Suami Tercinta dan Mertua yang sabar dan memberikan dukungan setiap saat.
9. Kepada Kakak dan Ponakan-ponakan yang tersayang.
10. Sahabat-Sahabat Mahasiswa/i Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Angkatan 2019. Terima kasih telah berjuang bersama dan menemani dimasa sulit pandemic Covid-19 dalam perkuliahan semester 1 sampai dengan semester 3. Baik jurusan Hukum Bisnis, Hukum Kesehatan maupun Hukum Pidana.
11. Teman-Teman S1 Fisip UNAS terutama Sahabat saya Rafdi Saifan Azzam Jurusan Hubungan Internasional dan ASN Kemenkumham RI terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang baik.
12. Rekan-rekan PT Chiyoda International Indonesia terutama Direktur Saya Mr. N. Tachibana dan HR Manager Ibu Nina Kasenda yang mendukung dan mengizinkan cuti untuk keperluan penyelesaian pendidikan saya.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan inahNya kepada kita semua dan juga kiranya Penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis.

Jakarta, 31 Juli 2021



Rachmani Aprilia Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	10
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	11
I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	11
I.5.1. Kerangka Teoritis	12
I.5.1.1. Teori Tanggung Jawab	12
I.5.1.2. Teori Hak Asasi Manusia	16
I.5.2. Kerangka Konseptual	22
I.6. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
II.1. Pengertian Omnibus Law	25
II.2. Pengertian Cipta Kerja	26
II.3. Pengertian Ketengakerjaan.....	27
II.4. Prinsip PBB Terkait Hak Asasi Manusia (Ketenagakerjaan)	33
II.5. Pengertian Aliha Daya (Outsourcing).....	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
III.1. Tipe Penelitian	40
III.2. Sifat Penelitian.....	42

III.3. Sumber Data	42
III.4. Metode Pengumpulan Data.....	43
III.5. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
IV. 1. Tanggung Jawab Perusahaan Dalam UU Cipta Kerja.....	47
IV.1.1. Perlindungan Pekerja Alih Daya Di Indonesia.....	47
IV.1.2. Norma Perlindungan Kerja Pada Perjanjian Kerja	49
IV.1.3. Jaminan Kesejahteraan Pekerja Dalam UU Cipta Kerja	54
IV.2. Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Bisnis dan HAM	59
IV.2.1. Rencana Aksi Nasional HAM Di Indonesia.....	60
IV.2.2. Pengaturan Pekerja Berdasarkan HAM Internasional	65
IV.2.3. Jaminan Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Prinsip ILO	69
BAB V PENUTUP	77
V.1. Kesimpulan	77
V.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP	